

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan struktur perekonomiannya didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). UMKM dijelaskan sebagai sebuah usaha yang dijalankan oleh masyarakat dengan secara produktif yang dipunyai dan juga dilakukan pengelolaan atas kegiatan operasionalnya dengan cara secara perorangan maupun juga ada yang berbentuk badan usaha dan sekaligus memenuhi kriteria usaha yang disyaratkan dengan mengacu secara langsung pada aturan UU No. 20 Tahun 2008. Tiap tahunnya, maka diketahui bahwa perkembangan yang terjadi pada UMKM khususnya yang berdiri di kawasan Indonesia kondisinya tampak tengah mengalami peningkatan yang begitu sangat pesat dan juga sekaligus signifikan, hal tersebut merupakan wujud nyata pembangunan ekonomi dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan membantu memenuhi kebutuhan pendapatan masyarakat (Dewi et al., 2023).

Mengacu pada data yang dicatat secara langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, maka telah berhasil mencatat adanya sekitar 65 juta orang yang memiliki pekerjaan sebagai pelaku UMKM yang khususnya telah berdiri usahanya ini di Indonesia yang data ini juga menunjukkan bahwa mayoritasnya adalah para pelaku usaha mikro. UMKM juga dinilai sebagai kegiatan usaha yang berhasil dicatat memberikan kontribusinya dengan angka senilai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dimana angka ini dapat disetarakan dengan nilai Rp9.580 triliun, dan juga UMKM merupakan kegiatan usaha yang berhasil menyerap sekitar 117 juta para pekerja (97%) dari banyaknya data total tenaga kerja yang

khususnya ada di negara Indonesia. UMKM juga mampu dalam membantu Indonesia menghadapi krisis ekonomi 1997-1998 maupun saat pandemi Covid-19. Pada saat banyak sektor usaha besar mengalami penurunan tajam, UMKM justru tetap mampu bertahan bahkan menjadi penopang pemulihan ekonomi di tingkat lokal. Kondisi ini, maka secara langsung juga berhasil memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam bagian sektor UMKM menunjukkan fungsi atau perannya yang dikatakan vital dengan tanpa hanya dianggap dalam hal ini sebagai penggerak ekonomi domestik, namun keberadaan UMKM juga berhasil dianggap selanjutnya sebagai kekuatan atau fondasi ketahanan ekonomi nasional.

Namun, di balik pertumbuhan jumlah UMKM tersebut, masih terdapat berbagai kesulitan yang selanjutnya ini merupakan bagian tantangan yang dirasakan oleh para pelaku usaha, dimana kesulitan ini terutama dalam aspek kinerja keuangan dan juga dalam mengelola manajemen bisnis mereka. Dengan kondisi seperti saat ini, maka hal inilah yang selanjutnya menjadikan begitu banyak para pelaku UMKM yang masih menghadapi masalah atau kendala dalam melakukan pengelolaan keuangan, dan perencanaan usaha, serta juga masalah ini juga disebabkan oleh kemampuan manajemen yang dapat dikatakan terbatas.

Dalam pandangan atau perspektif *Resource-Based View* (RBV), maka dijelaskan bahwa kinerja organisasi begitu sangat ditentukan atau bergantung oleh tingkat kemampuan internal dalam melakukan pengelolaan dan juga dalam memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang dipunyainya dengan secara efektif dan juga berkelanjutan. Dalam konteks UMKM, teori RBV menekankan bahwa sumber daya internal juga ikut menentukan keunggulan kompetitif. Dalam hal ini, sumber daya internal tersebut dapat berupa pengetahuan akuntansi yang merupakan

bentuk sumber daya intelektual, sikap keuangan yang merupakan nilai dan perilaku individu dalam mengelola sumber daya finansial, dan tingkat pendidikan pelaku usaha yang turut menentukan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami konsep manajerial dan pengelolaan keuangan.

Bali merupakan salah satu provinsi yang turut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kabupaten Buleleng sebagai salah satu daerah di Bali Selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah UMKM. Berikut adalah Perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng pada tabel berikut.

Tabel 1. 1
Jumlah UMKM Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No	Kecamatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Banjar	3.490	5.627	5.898	6.863	7.852
2	Buleleng	6.600	8.966	9.269	10.521	11.510
3	Busung Bui	3.687	5.826	6.102	7.062	8.051
4	Gerokgak	4.619	7.011	7.535	8.590	9.579
5	Kubutambahan	2.756	4.862	5.115	6.115	7.104
6	Sawan	3.228	5.256	5.517	6.502	7.494
7	Seririt	4.190	6.518	6.752	7.702	8.691
8	Sukasada	2.941	5.088	5.359	6.339	7.323
9	Tejakula	3.123	5.335	5.669	6.674	7.663
	Jumlah	34.634	54.489	57.216	66.368	75.267

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng, (2024)

Merujuk pada data yang direkap pada Tabel 1.1 yang memaparkan data yang didapatkan secara langsung dari Dinas Perdagangan, perindustrian, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, maka dari data ini dapat dipahami

secara lebih lengkap bahwa tepatnya pada tahun 2024 UMKM di Kecamatan Buleleng menunjukkan angka 11.510, di ikuti Kecamatan Gerokgak yang mencapai 9.579, Kecamatan Seririt 8.691, Kecamatan Busungbiu 8.051, Banjar 7.852, Tejakula 7.663, Sawan 7.494, Sukasada 7.323, Kubutambahan 7.104. Dari jumlah pertumbuhan yang terjadi menunjukkan bahwa peran UMKM sangatlah besar dalam mendukung perekonomian daerah. Kecamatan Tejakula telah dianggap menjadi salah satu daerah kawasan kecamatan di Buleleng yang mempunyai peran dan juga sekaligus posisi yang strategis dalam memberikan dukungannya atas pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, dimana termasuk di kawasan yang merupakan bagian daripada Kabupaten Buleleng.

Merujuk juga pada data yang ditampilkan dalam Tabel 1.1, maka dapat diketahui bahwa banyaknya jumlah UMKM yang telah tersebar khususnya di kawasan Kecamatan Tejakula tepatnya data ini dicatat pada tahun 2024 adalah sebanyak 7.653, dimana data yang didapatkan ini dengan secara langsung berhasil menunjukkan kedudukan atau posisi di kisaran menengah yang ada diantara kawasan kecamatan Buleleng dengan data sebanyak 11.510 UMKM dan juga untuk kawasan kecamatan Kubutambahan dengan data yang mencapai angka 7.104 UMKM. Tren peningkatan jumlah UMKM secara signifikan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan struktur ekonomi daerah. Mengingat kedudukan dari UMKM memiliki peran atau kontribusi yang besar yang membantu dalam menyediakan lapangan kerja, maka hal inilah yang menjadikan bahwa terjadinya peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat, dan juga membantu dalam memperkuat daya beli lokal, namun hal ini selanjutnya masih

sering menghadapi tantangan dalam melakukan aktivitas pengelolaan keuangan mereka dengan secara efisien dan juga efektif (Martadinata & Pasek, 2024).

Kinerja yang dimiliki oleh UMKM di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah dan belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan jumlah UMKM yang terjadi belum sepenuhnya meningkatkan kinerja usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Kinerja UMKM yang rendah umumnya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam hal manajerial dan pengelolaan keuangannya. Keterbatasan kemampuan tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas operasional usaha, tetapi juga menghambat proses pengambilan keputusan yang strategis.

Tabel 1. 2
Kinerja UMKM Kabupaten Buleleng tahun 2020

No	Aspek	Rata-Rata Presentase
1	Penurunan Penjualan	62%
2	Penurunan Laba Usaha	61%
3	Permasalahan Modal	Dialami oleh 71,4% UMKM
4	Penurunan Kemampuan Pembayaran Angsuran Bank	Dirasakan hampir 100% UMKM

Sumber: Balitbang Kab. Buleleng & LP2M Undiksha (2020)

Berdasarkan tabel 1.2, menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan yaitu penurunan penjualan rata-rata 62%, penurunan laba usaha rata-rata 61%, permasalahan modal yang dialami oleh 71,4% UMKM dan bahkan hampir seluruh UMKM mengalami kesulitan dalam membayar angsuran bank. Permasalahan kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng ini mencerminkan kesulitan sebagian besar pelaku UMKM dalam mempertahankan daya saing usahanya. Permasalahan terkait dengan kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng masih berlangsung hingga Tahun 2024. Hal ini

tercermin dari adanya kesulitan yang dialami pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit, yang terlihat pada data *Non-Performing Loan* (NPL) pada triwulan ketiga tahun 2024.

Tabel 1.3
Non-Performing Loan (NPL) Kredit UMKM

No	Kabupaten	NPL
1	Buleleng	3,12%
2	Jembrana	2,82%
3	Denpasar	2,68%
4	Karangasem	2,67%
5	Tabanan	1,53%
6	Klungkung	1,22%
7	Badung	1,00%
8	Gianyar	0,80%
9	Bangli	0,62%

Sumber: Bank Indonesia, (2024)

Berdasarkan data pada tabel 1.3, UMKM di Kabupaten Buleleng tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kredit bermasalah tertinggi di Provinsi Bali, yaitu sebesar 3,12% disusul Kabupaten Jembrana sebesar 2,82%, dan Kabupaten Denpasar sebesar 2,68%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng kurang baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pelaku UMKM, memperlihatkan adanya penurunan laba yang terjadi, hal tersebut memperkuat bahwa kinerja UMKM terhadap penerima kredit di Kabupaten Buleleng berada dalam keadaan yang kurang baik dan sebagian besar penurunan laba tersebut disebabkan oleh ketidakstabilan penjualan.

Tabel 1. 4
Performa Kinerja UMKM di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Kinerja lebih buruk	Presentase Performa Usaha
1	Buleleng	5.231	20,78%
2	Denpasar	4.308	17,12%
3	Gianyar	4.249	16,88%
4	Badung	3.594	14,28%
5	Tabanan	2.511	9,97%
6	Jembrana	2.370	9,42%
7	Bangli	1.222	4,86%
8	Karangasem	1.067	4,24%
9	Klungkung	614	2,44 %
total		25.166	100 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Jumlah UMKM yang mengalami peningkatan mengharuskan pelaku usaha untuk memperhatikan kinerja agar dapat mempertahankan usahanya (Suindari & Juniariani, 2020). Namun berdasarkan tabel 1.4, UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki tingkat performa kinerja UMKM yang buruk yaitu 5.231 atau 20,79%, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng memiliki kontribusi tertinggi terhadap jumlah UMKM dengan kinerja lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya di Bali. Kondisi ini tentu menjadi fenomena yang krusial, mengingat Kabupaten Buleleng memiliki peran strategis sebagai pusat perekonomian di wilayah Bali Utara yang diharapkan memiliki kinerja yang sehat. Kinerja usaha yang rendah pada akhirnya dapat memengaruhi daya saing UMKM, terutama ketika menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif dan tuntutan adaptasi di era digital. Tak sedikit dari pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam menjaga kestabilan usahanya akibat persaingan yang ketat dan terbatasnya daya beli konsumen. Hal tersebut dikarenakan masalah terkait manajerial usaha, yang hampir semua pelaku UMKM rasakan.

Dalam meningkatkan kinerja, maka telah terdapat berbagai macam kesulitan yang dianggap sebagai tantangan dari para pelaku usaha yang telah mencakup adanya keterbatasan akan pengetahuan akuntansi, literasi keuangan, dan pengelolaan keuangan serta juga sampai keterbatasan dalam modal pinjaman (Paraswati & Aisa, 2023). Dijelaskan bahwa semua faktor yang dinilai memicu atau memberikan pengaruhnya merujuk pada tingkat kinerja UMKM, maka selanjutnya hal ini dapat dipaparkan dengan secara lebih lanjut dalam teori RBV, dimana dijelaskan bahwa konsep atau teori ini memberikan penjelasan terkait bagaimana perusahaan dapat meraih hasil berupa keunggulannya dalam bersaing dengan mempunyai dan sekaligus dalam melakukan proses pengelolaan atas ketersediaan sumber daya internal yang telah dimilikinya. Kinerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka dinilai begitu sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam menghasilkan dan mengelola sumber daya yang unik dan spesifik agar dapat bersaing dan bertahan dalam berbagai situasi (Devi et al., 2021).

Manajemen keuangan sebagai salah satu aspek penting dalam menjalankan usaha, yang seringkali diabaikan oleh para pelaku UMKM karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki (Trisnawati & Dewi, 2024). Hal tersebut dapat mempengaruhi pelaku usaha dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pengetahuan keuangan yang memadai agar dapat mendorong kinerja UMKM (Sihombing & Masdiantini, 2021). Pengetahuan akuntansi yang merupakan bagian dari keuangan merupakan pemahaman mengenai keuangan, prinsip, tanggungjawab dan penyusunan transaksi keuangan secara sistematis guna proses pengambilan keputusan (Jamil et al., 2022). Dijelaskan dalam teori RBV bahwa pengetahuan akuntansi dianggap sebagai

bagian atas sumber daya internal yang tanpa memiliki wujud yang dipunyai oleh individu.

Teori RBV dalam kaitannya atau konteks UMKM, maka sangat memberikan penekanan dengan menjelaskan bahwa pengetahuan akuntansi telah dianggap selanjutnya sebagai salah satu bentuk sumber daya intelektual (*Intellectual Capital*) yang posisi atau perannya dinilai memiliki nilai sangat strategis. Dijelaskan selanjutnya bahwa pengetahuan akuntansi dalam hal ini akan memungkinkan para pelaku usaha untuk melakukan proses pencatatan, melakukan bagian klasifikasikan, dan juga sekaligus akan adanya proses menganalisis segala catatan atau transaksi keuangan yang dilakukan dengan secara sistematis, sehingga hal ini selanjutnya dapat digunakan untuk menghasilkan informasi dengan secara akurat bagi pengambilan keputusan yang bersifat secara manajerial.

Merujuk pada hasil atas melangsungkan kegiatan observasi yang dengan secara langsung telah dilakukan dengan adanya dukungan bantuan dari para pelaku UMKM khususnya di Kecamatan Tejakula, maka dalam kegiatan ini berhasil telah ditemukan bahwa adanya pemahaman yang dipunyai yang ada hubungan atau hal ini terkait dengan akuntansi yang dianggap masih tergolong cukup rendah. Hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap salah satu pelaku UMKM, bapak Nyoman Sirta mengatakan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kecamatan Tejakula belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya pencatatan transaksi keuangan secara terstruktur. Beliau juga menyampaikan bahwa kebanyakan pelaku UMKM sangat mengandalkan ingatan atau catatan sederhana, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan seringkali tidak akurat dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha.

Pengetahuan mereka mengenai penyusunan laporan keuangan masih rendah karena mereka tidak mengetahui Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan usaha mereka. Hal tersebut, maka secara langsung telah memberikan gambaran bahwa para pelaku UMKM yang khususnya ada di Kecamatan Tejakula mempunyai pemahaman akuntansi yang cukup rendah yang dengan secara khususnya dalam aspek pencatatan transaksi keuangan, sehingga sangat masih memerlukan adanya pemberian edukasi dengan secara lebih lanjut yang ada hubungannya mengenai pengelolaan keuangan agar mampu meningkatkan kinerja keuangannya dan mendatangkan keuntungan bagi usahanya.

Teori RBV menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi sebagai sumberdaya internal yang langka dan bernilai tinggi, serta sulit ditiru tanpa pembelajaran dan pengalaman yang memadai karena tidak semua pelaku UMKM memiliki pengetahuan akuntansi. Hal ini diperkuat oleh hasil riset yang berhasil ditemukan oleh Suyono & Zuhri (2022) dan Lestari & Rustiana (2019) dengan menyatakan hasilnya bahwa pengetahuan akuntansi memunculkan hasil dampak pengaruhnya secara positif pada kinerja UMKM, sedangkan hasil temuan yang dihasilkan oleh Paraswati & Aisa (2023) telah memaparkan hasil yang membuktikan bahwa pengetahuan akuntansi tanpa memunculkan hasil pengaruhnya merujuk pada kinerja UMKM. Dari hasil riset yang dilakukan sebelumnya, maka telah memberikan informasi bahwa masih menunjukkan adanya hasil yang dinyatakan tidak konsisten, dimana hal inilah yang selanjutnya membuat masih sangat perlunya dilakukan riset dengan secara lebih lanjut atas kontribusi pengaruh yang diberikan oleh pengetahuan akuntansi pada kinerja UMKM.

Faktor selanjutnya yang juga dinilai turut serta dalam memberikan dampak pengaruhnya dengan merujuk pada tingkat kinerja UMKM yakni sikap keuangan. Dijelaskan bahwa sikap keuangan telah mengarah pada penilaian, tanggapan atau pendapat, ataupun juga kondisi atau keadaan pikiran yang didapatkan dari seseorang yang mengarah pada penilaiannya tentang keuangan yang diterapkannya ke dalam sikapnya (Nopiyani & Indiani, 2023). Dalam teori RBV sikap keuangan dipandang sebagai sumber daya internal yang berharga. Hal itu dikarenakan sikap keuangan yang positif, seperti cara pandang pelaku usaha terhadap uang, disiplin dalam pengelolaan dana dan *Self-Control* dalam mengambil keputusan keuangan sehari-hari menjadi suatu hal yang berharga bagi UMKM untuk selanjutnya membantu dalam meningkatkan hasil kinerja yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM dan juga daya saing. Sikap keuangan tidak dapat diperoleh secara instan atau ditiru begitu saja, karena terbentuk melalui proses pembelajaran, pengalaman, serta interaksi sosial dan budaya individu pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam RBV sikap keuangan dianggap sebagai sumber daya internal yang langka karena tidak semua para pelaku usaha dalam hal ini mempunyai sikap keuangan yang secara baik dan hal ini dapat ditemukan sebagian kecil dari para pelaku usaha yang dalam hal ini mampu melakukan pengembangan sikap keuangan yang secara benar dan positif.

Merujuk pada perolehan atas melangsungkan hasil observasi dan juga didukung oleh data melangsungkan wawancara dengan para pelaku UMKM yang secara khususnya ada di kawasan Kecamatan Tejakula, maka hal ini berhasil selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian besar para pelaku UMKM dinilai mempunyai sikap keuangan yang cukup terbilang rendah. Kondisi ini telah berhasil

tampak atau dibuktikan dari caranya melakukan pengelolaan keuangan yang belum mampu terencana dengan secara baik, di mana ditemukan adanya sebagian besar para pelaku UMKM yang belum melakukan proses pemisahan keuangan pribadinya dengan keuangan usaha serta juga belum mempunyai kebiasaan melakukan proses pencatatan transaksi dengan secara teratur.

Hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di Desa Pacung, yaitu Ibu Luh Suersih, menguatkan temuan tersebut. Beliau menyampaikan bahwa dalam menjalankan usahanya, ia terbilang jarang dalam melakukan pencatatan atas pengeluaran dan pemasukan usahanya secara rutin karena menganggap hal tersebut tidak terlalu penting selama usaha masih berjalan dan modal masih berputar. Selain itu, beliau juga mengakui sering mencampur keuangan usaha dengan keluarga. Kondisi tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih meremehkan betapa pentingnya pencatatan keuangan secara rutin dan tidak berusaha meningkatkan pemahaman tentang hal tersebut (Dewi et al., 2025). Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya sikap keuangan pelaku UMKM adalah kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangannya dan keputusan yang diambil seringkali dilakukan tanpa didasari oleh informasi keuangan yang sebenarnya. Dengan demikian, maka dalam hal ini dijelaskan bahwa seharusnya para pelaku UMKM sudah dengan seharusnya memperhatikan manajemen keuangan pada kegiatan usahanya (Benu et al., 2022).

Penelitian terdahulu yang masih mengalami ketidakkonsistenan, maka telah berhasil menunjukkan bahwa masih sangat diperlukan adanya melakukan aktivitas penelitian dengan secara lebih lanjut yang membahas mengenai kontribusi pengaruh yang diberikan oleh adanya sikap keuangan yang merujuk pada kinerja

UMKM. Hasil temuan yang ada sebelumnya, maka menjelaskan bahwa dengan hasil sikap keuangan memunculkan hasil pengaruhnya dengan arah positif dan juga sekaligus signifikan yang merujuk pada kinerja UMKM, dimana hasil ini ada dalam studi yang dilakukan oleh Nopiyani & Indiani (2023) dan Rusnawati et al. (2022). Sedangkan hasil yang membuktikan bahwa sikap keuangan dengan hasil dampak pengaruhnya secara signifikan tanpa mampu memberikan pengaruhnya merujuk pada kinerja UMKM telah dihasilkan oleh Utami dan Abdullah (2024).

Faktor selanjutnya yang memengaruhi kinerja UMKM adalah tingkat Pendidikan, dalam teori *Resource-Based View* (RBV) tingkat Pendidikan dikategorikan sebagai faktor internal yang menekankan bahwa keunggulan bersaing suatu organisasi atau unit usaha bergantung pada bagaimana seseorang atau organisasi tersebut mampu memanfaatkan dan juga sekaligus melakukan pengelolaan atas ketersediaan sumber daya internal yang dipunyainya, baik yang memiliki sifat *Tangible* (ada wujudnya) maupun yang memiliki sifat *Intangible* (tanpa ada wujudnya) (Barney, 1991). Dijelaskan bahwa Tingkat Pendidikan merupakan bagian proses atas tahapan Pendidikan yang telah dilakukan penetapan dengan cara berlandaskan pada tingkat perkembangan seseorang, sehingga hal ini selanjutnya akan mampu menjadikan seseorang mudah dalam melakukan proses penyerapan informasi dan juga mudah dalam mengimplementasikannya. Kemampuan dan juga sekaligus keahlian yang dipunyai oleh para pelaku UMKM begitu sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang pernah ditempuhnya baik secara dalam penilaian formal maupun dalam penilaian secara nonformal (Oktavia & Masdiantini, 2023). Pendidikan yang diperoleh membantu pelaku usaha dalam membentuk pola pikir yang rasional, memberikan pengetahuan, keterampilan, dan

wawasan kepada individu yang dapat membantu mereka memahami konsep-konsep keuangan, membuat perencanaan, serta mengambil keputusan keuangan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil observasi pada pelaku UMKM, menunjukkan bahwa tak sedikit dari pelaku UMKM yang hanya menamatkan pendidikan formal hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan formal yang dimiliki sebagian besar pelaku usaha. Tingkat pendidikan yang relatif rendah dapat memengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara lebih profesional, khususnya terkait pemahaman aspek keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Aliyudin et al., 2023) dan (Qudsi et al., 2023) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mutia, 2021) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut menandakan bahwa masih diperlukannya penelitian mengenai pengaruh tingkat Pendidikan terhadap kinerja UMKM.

Kondisi UMKM di Kecamatan Tejakula menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah UMKM belum menjamin kualitas dalam pengelolaan usaha. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan yang terjadi antara kuantitas dan kualitas, yang dapat berimplikasi pada rendahnya daya saing dan keberlanjutan usaha di masa mendatang. Oleh karena itu, kesenjangan ini penting untuk diteliti lebih lanjut agar dapat menemukan strategi yang tepat dalam meningkatkan kinerja UMKM. Selain itu, inkonsistensi pada penelitian terdahulu terhadap variabel-variabel penelitian yang meliputi pengetahuan akuntansi, sikap keuangan dan tingkat pendidikan

terhadap kinerja UMKM menjadi alasan yang melatarbelakangi pengujian kembali pengaruh dari variabel-variabel tersebut. Minimnya penelitian mengenai tingkat pendidikan yang dikaitkan dengan kinerja UMKM menjadi dorongan untuk menciptakan kebaruan penelitian, terutama dilihat dari segi lokasi penelitian.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Mellinia et al., 2023) mengenai "Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, dan Perilaku Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja UMKM Bidang Kuliner". Berdasarkan dari penelitian sebelumnya menggunakan variabel Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, dan Perilaku Pengelolaan Keuangan. Namun dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel Pengetahuan Akuntansi, Sikap Keuangan, dan Tingkat Pendidikan. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Sikap Keuangan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Tejakula”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya kinerja UMKM di Kecamatan Tejakula diketahui dari hasil observasi dan wawancara pada pelaku UMKM. Kinerja yang rendah tersebut turut menyebabkan tingginya tingkat NPL UMKM di Kabupaten Buleleng.

2. Sebanyak 15 dari 20 pelaku UMKM di Kecamatan Tejakula tidak memiliki pengetahuan akuntansi dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan formal pelaku UMKM yang relatif rendah, kurangnya akses terhadap pelatihan dan pendampingan di bidang akuntansi, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan yang berdampak pada penurunan keuntungan/laba yang mengakibatkan kesulitan membayar tanggungan kredit.
3. Sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Tejakula menunjukkan kecenderungan sikap keuangan yang rendah. Ketidakpastian terhadap kemampuan mencapai target keuangan, ditambah mereka yang menunjukkan sikap meremehkan aspek pencatatan keuangan, dapat menghambat pengambilan keputusan yang rasional dan berdampak pada pengelolaan keuangan yang kurang efektif.
4. Sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Tejakula yang diwawancarai memiliki tingkat pendidikan formal yang relative rendah. Rendahnya tingkat pendidikan pelaku UMKM dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memahami aspek-aspek penting pengelolaan bisnis, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta pemanfaatan informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, penulis membatasi permasalahan dan memfokuskan pada tiga variabel utama yaitu pengetahuan akuntansi, sikap keuangan, dan tingkat pendidikan yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja UMKM di kecamatan tejakula.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Tejakula?
2. Apakah sikap keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Tejakula?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Tejakula?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan akuntansi terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Tejakula.
2. Untuk membuktikan pengaruh dari sikap keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Tejakula.

3. Untuk membuktikan pengaruh dari tingkat pendidikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Tejakula.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan *Resource-Based View* (RBV), sekaligus berkontribusi pada pengembangan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan, dan Kewirausahaan.
- b. Dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti selanjutnya bagi yang ingin melakukan studi lanjutan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja UMKM.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk meningkatkan wawasan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM di Kecamatan Tejakula, diantaranya adalah pengetahuan akuntansi, sikap keuangan, dan tingkat pendidikan.

b. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pelaku UMKM terkait dengan pengetahuan akuntansi, sikap keuangan, dan tingkat pendidikan, untuk meningkatkan kinerja UMKM.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademis serta menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja UMKM di Kecamatan Tejakula.

